



**BANK PROFIDANA**

*Mitra Sejati Anda*

**LAPORAN TRANSPARANSI  
PELAKSANAAN TATA KELOLA  
PT BPR PROFIDANA PARAMITRA  
TAHUN 2025**

**Jalan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro  
(Ringroad Selatan) Dongkelan, Sewon, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta**

LEMBAR PERSETUJUAN  
LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA  
PT BPR PROFIDANA PARAMITRA  
TAHUN 2025

Laporan Transparansi Tata Kelola Tahun 2024 PT BPR Profidana Paramitra telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Sesuai dengan ketentuan pasal 102 ayat 1 menyatakan bahwa BPR dan BPRS wajib Menyusun laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola setiap akhir tahun buku dan sesuai dengan pasal 102 ayat 3 menyatakan bahwa Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola wajib disampaikan kepada paling sedikit :

1. Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
2. Pemegang saham pengendali
3. Asosiasi BPR bagi BPR atau asosiasi BPR Syariah bagi BPR Syariah di Indonesia
4. pemangku kepentingan melalui situs web BPR dan BPR Syariah

paling lambat tanggal 30 April untuk laporan posisi akhir bulan Desember.


Demikian **Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR PT. BPR Profidana Paramitra Periode Tahun 2025** disusun dan segera dilaporkan sesuai dengan ketentuan.

Yogyakarta, 20 April 2026


**PT BPR PROFIDANA PARAMITRA**

Disusun oleh

  
  
Dwi Hari Laksana, SE, MM  
Direktur Utama

  
Wahyu Susila Listya Ari, SE, MH  
Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Disetujui Oleh

  
Drs. St. Sudomo, MM  
Komisaris Utama

**LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA  
PT BPR PROFIDANA PARAMITRA  
PERIODE : 31 DESEMBER 2025**

**A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola**

Alamat	Jl. Prof. Dr. Wirjono Projodikoro (Ringroad Selatan) Dongkelan Sewon Bantul Yogyakarta
Nomor Telepon	(0274) 372083
Penjelasan Umum	<p>Kegiatan dan perkembangan industri Perbankan yang semakin kompleks untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar agar industri Perbankan dapat mendukung sektor ekonomi akan meningkatkan eksposur risiko sehingga diperlukan peningkatan kinerja Bank dan praktek penyelenggaraan bisnis Perbankan yang sehat, beretika dan transparan melalui komitmen dan mekanisme yang mampu menjaga kepentingan semua pihak, baik yang memberi kepercayaan maupun pihak yang menerima kepercayaan dalam menjalankannya. Menjaga tingkat kesehatan Bank dengan Tata Kelola yang baik menjadi hal yang penting meningkatkan rasa aman bagi masyarakat sebagai nasabah perbankan. Tujuan Pelaksanaan GCG di BPR. PROFIDANA PARAMITRA sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank;</li><li>b. menciptakan pengelolaan bank yang sehat, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, guna meningkatkan nilai BPR serta menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang;</li><li>c. Memastikan seluruh kegiatan operasional BPR mematuhi peraturan internal, peraturan perundang-undangan, serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);</li><li>c. Membangun kepercayaan nasabah, masyarakat, dan pemegang saham melalui transparansi dan akuntabilitas;</li><li>d. Memperbaiki budaya kerja Bank;</li><li>e. Mendorong pengambilan keputusan oleh pengurus dan karyawan yang didasari pada lima prinsip dasar: Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran (TARIF);</li><li>f. Menjamin kesehatan, kemajuan, dan keberlangsungan BPR secara berkelanjutan;</li><li>g. Menghindari potensi benturan kepentingan dalam manajemen dan operasional BPR.</li></ul>

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	Hasil penilaian sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Tata Kelola pada periode Desember Tahun 2024 pada peringkat 2 (Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR

## B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	
	Nama	Dwi Hari Laksana, SE.MM
	Jabatan	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung jawab	Sebagai Direktur utama memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1) Menentukan Kebijakan umum dalam memimpin Bank untuk mencapai tujuan perusahaan; 2) Bertanggung jawab atas penyusunan garis – garis kebijakan perusahaan di bidang administrasi keuangan, kepegawaian dan umum serta perkreditan dalam upaya membangkitkan tingkat kesehatan dan pertumbuhan bank; 3) Bertanggung jawab dan mengurus harta kekayaan perusahaan dan mengawasi serta mengelola hubungan ataupun transaksi usaha dan keuangan perusahaan; 4) Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja perusahaan setiap tahun, bersama – sama dengan semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi; 5) Bertanggung jawab atas penyusunan laporan/program dan realisasinya pada setiap periode pertanggung jawaban anggaran; 6) Mengadakan perubahan – perubahan dalam struktur organisasi sesuai dengan perkembangan usaha bank; 7) Membuat keputusan dalam hal memberikan jumlah pinjaman kepada calon nasabah (debitur); 8) Menandatangani persetujuan kredit pada forum rapat panitia kredit (loan committee); 9) Mengendalikan dan mengawasi tugas – tugas pemberian persetujuan kredit, pengelolaan sumber daya manusia, pengawas dan pendanaan bank;

	Tugas dan Tanggung jawab	10) Menyelenggarakan dan mempersiapkan bahan – bahan laporan untuk rapat – rapat Direksi dan komisaris; 11) Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham, bersama – sama dengan semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sekaligus menyampaikan laporan pertanggung jawaban Direksi untuk tahun buku bersangkutan; 12) Menandatangani surat – surat berharga dan dokumen penting perusahaan baik sendiri ataupun bersama dengan anggota dewan komisaris sesuai dengan aturan yang ada; 13) Menandatangani surat keputusan direksi secara sendiri atau bersama – sama yang meliputi segala gaji, promosi, mutasi, dan pemberhentian karyawan; 14) Membina hubungan dengan para pejabat Bank Indonesia dan Departemen keuangan agar tercipta kerjasama dan bimbingan dari kedua instansi Pembina tersebut; 15) Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah menunjukkan pengabdian dan kesetiannya kepada bank; 16) Bertanggung jawab terhadap pencapaian rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh dewan komisaris; 17) Menandatangani laporan – laporan bank yang penting khususnya laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak – pihak extern lainnya; 18) Mengangkat dan memberhentikan karyawan atas usul dari para Kepala Bidang unit kerja/bagian personalia; 19) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen; 20) Direksi wajib mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta standar yang relevan
	Nama	Wahyu Susila Listya Ari, SE.MH
	Jabatan	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung jawab	Sebagai Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1) Bertanggung jawab membawa misi pengenalan dan misi perusahaan pada umum dengan melakukan fungsi humas; 2) Memonitor dan mengevaluasi laporan pengendalian biaya, perubahan dan perkembangan pendapatan bank secara periodic dan berkesinambungan; 3) Mewakili Direksi dalam hal Direktur Utama sedang berhalangan; 4) Mengkoordinasi dan mengarahkan semua kegiatan – kegiatan pada setiap bagian sesuai dengan SOP masing-masing; 5) Melakukan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dalam kantor, termasuk pada semua unit kerja; 6) Memeriksa dan mengawasi administrasi keuangan bank ; 7) Meneliti kebenaran dan kelengkapan atas laporan keuangan, terutama neraca dan perhitungan rugi/laba perusahaan ; 8) Mengadakan pengawasan serta penilaian terhadap efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tata kerja sesuai dengan ketentuan organisasi ;

Tugas dan Tanggung jawab	9) Meneliti kebenaran dan mengawasi semua pengeluaran biaya – biaya operasional ; 10) Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja perusahaan sampai ke unit terbawah; 11) Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan ; 12) Memastikan kegiatan usaha BPR memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; 14) Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Utama sepanjang masih dalam ruang lingkup tugas dan fungsinya sebagai Direktur Kepatuhan; 14) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen; 15) Direksi wajib mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta standar yang relevan
--------------------------	---

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

1. Direksi harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan prinsip prudential Banking; 2. mampu melakukan pengembangan bisnis berbasis informasi dan teknologi agar mampu bersaing dengan fintech; 3. Memenuhi kelengkapan struktur organisasi sesuai dengan ketentuan; 4. Memastikan kecukupan, kualitas dan pengembangan kompetensi SDM agar dapat mendukung perkembangan Organisasi; 5. Melakukan tindak lanjut seluruh temuan hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal (KAP, OJK,dll) 6. Melakukan langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah dalam penyelesaian NPL seperti melaksanakan lelang dan/atau penjualan bersama agunan; 7. Meningkatkan kemampuan yang mendukung peningkatan permodalan bank secara organik untuk pengembangan BPR ; 8. Dengan pemberian restrukturisasi kredit maka dilakukan pemantauan terhadap kondisi usaha debitur dengan melakukan self assessment secara berkala sebagai mitigasi penurunan kualitas debitur; 9. pemantauan kondisi likuiditas harian dan pengaturan dana yang belum digunakan dengan baik; 10 melakukan stress kecukupan modal secara berkala; 11. Meningkatkan fungsi audit intern dan manajemen risiko dalam menghindari terjadinya fraud

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	
	Nama	ST. Sudomo, DRS.MM
	Jabatan	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung jawab	Sebagai Komisaris Utama memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1) Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategic, termasuk persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank; 2) Sebagai pusat komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi, serta pemegang saham; 3) Memastikan bahwa Dewan Komisaris senantiasa diberi informasi mengenai hal-hal yang relevan dan dimintakan persetujuan yang diperlukan; 4) Bertanggung jawab memimpin Dewan Komisaris guna menjamin efektifitas fungsi Dewan Komisaris; 5) Bertanggung jawab untuk menentukan agenda rapat dan memimpin rapat; 6) Komisaris Utama menentukan keadaan mendesak dalam hal undangan rapat Dewan Komisaris dilakukan dalam waktu kurang dari 3 hari;
	Tugas dan Tanggung jawab	7) Mengundang anggota Dewan Komisaris untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris; 8) Memastikan agar para Komisaris mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu dan jelas; 9) Membina hubungan yang konstruktif antara Dewan Komisaris dan Direksi; 10) Mengembangkan standar Corporate Governance yang terbaik; 11) Menghadiri semua rapat Dewan Komisaris dan rapat Komite terkait; 12) Menghadiri semua rapat Pemegang Saham; 13) Dewan Komisaris untuk sementara waktu diwajibkan untuk mengurus bank apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara; 14) Dewan Komisaris wajib mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta standar yang relevan; 15) Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan

	Nama	Sapto Dewo, SE.Msi
	Jabatan	Komisaris
	Tugas dan Tanggung jawab	Sebagai Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1) Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; 2) Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan menyetujui rencana bisnis; 3) Bersama-sama dengan Komisaris Utama melakukan pengawasan atas realisasi rencana bisnis; 4) Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan menyetujui laporan tahunan; 5) Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris; 6) Pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan;
	Tugas dan Tanggung jawab	7) Menghadiri semua rapat Dewan Komisaris dan rapat Komite terkait; 8) Menghadiri semua rapat Pemegang Saham; 9) Memberikan masukan strategi serta meninjau kinerja dan efektifitas manajemen pada rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja; 10) Mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta standar yang relevan; 11) Dewan Komisaris untuk sementara waktu diwajibkan untuk mengurus bank apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara; 12) Dewan Komisaris wajib mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta standar yang relevan; 13) Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan
Rekomendasi Kepada Direksi :		

Nasihat dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi antara lain adalah : 1) Direksi wajib membuat Rencana Bisnis jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang secara detail serta langkah-langkah strategis untuk pencapaian target sesuai dengan Rencana Bisnis yang telah ditetapkan serta memantau pencapaian target yang telah ditetapkan; 2) Menjaga Tingkat kesehatan sesuai dengan POJK Nomor 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang mencakup penilaian terhadap 4 (empat) faktor yang terdiri atas a) Profil risiko, b) Tata Kelola BPR, c) Rasio Rentabilitas (ROA, BOPO, NIM), d) Rasio Permodalan (KPMM, MIAPB) dalam predikat “SEHAT”; 3) Meningkatkan kualitas pelaksanaan penyaluran kredit dengan berpedoman kepada Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB), penerapan prinsip kehati-hatian, perbaikan kualitas analisa kredit, pemantauan kualitas kredit, dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian kredit bermasalah; 4) Dalam pemberian restrukturisasi bagi debitur harus sesuai dengan kapasitas debitur sehingga kualitas kredit debitur kembali Lancar; 5) Memperhatikan kecukupan modal dengan melakukan self assessment secara berkala; 6) Membuat strategi peningkatan pendapatan Bank dengan peningkatan penyaluran kredit, pengelolaan dana serta memantau efisiensi dan efektifitas biaya Bank; 6) Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tata Kelola sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah; 7) Penerapan Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang efektif; 8) Melakukan tindak lanjut dan komitmen hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas, Akuntan Publik (KAP), maupun Audit Internal; 8) Terus melaksanakan penerapan program APU PPT dan membuat SOP Penerapan Program APU PPT sesuai dengan POJK No 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

#### a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite*)	
1.	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung jawab	
	Program Kerja	
	Realisasi	
	Jumlah Rapat	
2.	Komite Pemantau Risiko	
	Tugas dan Tanggung jawab	
	Program Kerja	
	Realisasi	
	Jumlah Rapat	
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Tugas dan Tanggung jawab	
	Program Kerja	
	Realisasi	
	Jumlah Rapat	

4.	Komite Manajemen Risiko	
	Tugas dan Tanggung jawab	
	Program Kerja	
	Realisasi	
	Jumlah Rapat	
5.	Komite Lainnya	
	Tugas dan Tanggung jawab	
	Program Kerja	
	Realisasi	
	Jumlah Rapat	

Sesuai dengan ketentuan modal inti, BPR belum memiliki kewajiban untuk membentuk komite

**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

No	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen Ya / Tidak
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	

Sesuai dengan ketentuan modal inti, BPR belum memiliki kewajiban untuk membentuk komite

### C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham pada BPR

#### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal Tahun Sebelumnya (Rp)	Persentase Kepemilikan Tahun Sebelumnya (%)
1	Dwi Hari Laksana, SE.MM	0	0	0	0
2	Wahyu Susila Listya Ari, SE.MH	0	0	0	0

#### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal Tahun Sebelumnya (Rp)	Persentase Kepemilikan Tahun Sebelumnya (%)
1	ST. Sudomo, DRS.MM	1.151.600.000	15,15	1.146.600.000	15,09
2	Sapto Dewo, SE.Msi	152.500.000	2,01	151.800.000	2,00

#### 3. Kepemilikan Pemegang Saham Pada BPR

No	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal Tahun Sebelumnya (Rp)	Persentase Kepemilikan Tahun Sebelumnya (%)
1	Ny. Edi Soelistijani, SH	3.915.800.000	51.53	3.898.700.000	51.30
2	Sudarmadji Harry Sutrisno	1.030.700.000	13.56	1.026.200.000	13.50
3	Endang Wuryati	724.300.000	9.53	721.100.000	9.49
4	Ny Dra,MI Sri Murniati,M.Hum	205.600.000	2.71	238.100.000	3.13

No	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal Tahun Sebelumnya (Rp)	Persentase Kepemilikan Tahun Sebelumnya (%)
5	Ny Dewi Wahyuningsih Sutowo	217.700.000	2.86	216.700.000	2.85
6	Agus Yulianto, SE	126.300.000	1.66	125.700.000	1.65
7	Yusa Cahya Permana, ST	74.600.000	0.99	74.200.000	0.98

#### **D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

##### **1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada Perusahaan Lain**

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Dwi Hari Laksana, SE.MM	Tidak Ada	Tidak Ada	0
2	Wahyu Susila Listya Ari, SE.MH	Tidak Ada	Tidak Ada	0

##### **2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada Perusahaan Lain**

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	ST. Sudomo, DRS.MM	Tidak Ada	Tidak Ada	0
2	Sapto Dewo, SE.Msi	Tidak Ada	Tidak Ada	0

Keterangan :

Seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada perusahaan lain

## E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Dwi Hari Laksana, SE.MM	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Wahyu Susila Listya Ari, SE.MH	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

### 2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ST. Sudomo, DRS.MM	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Sapto Dewo, SE.Msi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

**Keterangan :**

Seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan.

## F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

### 1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Dwi Hari Laksana, SE.MM	Tidak Ada	Tidak Ada	Edi Soelistijani SH - Orang tua
2	Wahyu Susila Listya Ari, SE.MH	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ST. Sudomo, DRS.MM	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Sapto Dewo, SE.Msi	tidak ada	tidak ada	DRS. Sudarmadji Herry Sutrisno - Saudara Kandung, Endang Wuryati - Saudara Ipar

**Keterangan :**

Direktur utama memiliki hubungan keluarga dengan PSP BPR, Salah satu anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga dengan 2 pemegang saham bukan pengendali

**G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS pada BPR**

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	555.210.000	2	253.063.500
2	Tunjangan	2	77.846.054	2	12.374.776
3	Tantiem	2	113.993.148	2	56.996.574
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	-
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	-
	<b>Total Remunerasi</b>		<b>747.049.202</b>		<b>322.434.850</b>
<b>Jenis Fasilitas Lain</b>					
1	Perumahan	0	0	0	0
2	Transportasi	2	195.010.000	0	0
3	Asuransi Kesehatan	0	0	0	0
4	Fasilitas Lainnya	0	0	0	0
	<b>Total Fasilitas Lain</b>		<b>195.010.000</b>		-
	<b>Total Remunerasi dan Fasilitas lain</b>		<b>942.059.202</b>		<b>322.434.850</b>

**Keterangan:**

Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris telah disampaikan dan disetujui berdasarkan Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) yang diselesaikan pada tanggal 15 Maret 2025 di Hotel Crystal Lotus yang dihadiri oleh 100% pemegang saham



## H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah dalam Perbandingan

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5.97	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.23	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.24	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.28	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	1.96	1

Keterangan :

Penetapan gaji karyawan ditentukan berdasarkan masa kerja, jabatan, prestasi kerja, dan tingkat pendidikan karyawan dimana penetapan gaji telah sesuai dengan ketentuan Dinas Ketenagakerjaan dengan gaji terendah sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP DIY)

### I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Dalam 1 Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	26/02/2025	2	<p>Materi rapat Dewan Komisaris pada tanggal 26 Februari 2025 antara lain : 1) Evaluasi kinerja BPR dan pencapaian target periode 31 Januari 2025 terhadap Rencana Bisnis yang telah ditetapkan sbb: a. Aset 98.48%, KYD 99,61%, simpanan 97,54%; b. KYD dan DPK cenderung meningkat namun belum mencapai target sehingga laba masih dibawah target RBB, NPL dan KAP cenderung menurun; c. Terdapat gap antara target dan realisasi yang cukup jauh dari batas toleransi atau &gt;5% pada pos pendapatan, biaya dan Laba/Rugi; 2) Tingkat pertumbuhan BPR bulan Januari 2025 yoy Aset 3,92%, Kredit -1,34%, simpanan 0,54%, pendapatan 19,6%, biaya 33,37% laba -443,57%; 3) Tingkat Kesehatan Bank dalam kategori Sehat, Rasio CR 14,81%, LDR 94,09%, KPMM 36,22%, MIAPB 170,4%, NPL 11,08%, KAP 8,15% ROA -1,39%, BOPO 108,18%; Rasio NPL, BOPO, ROA, dan KAP perlu menjadi perhatian dan diperbaiki; 4) Rekomendasi untuk direksi antara lain : 1) Apresiasi kepada Direksi karena dalam kondisi yang kurang kondusif pada tahun 2024 masih dapat memperoleh laba walaupun masih dibawah tahun lalu, 2) Pertumbuhan Bank masih dibawah rata-rata industri baik di Bantul maupun DIY, Direksi perlu waspada, 3) RUPS dapat diselenggarakan maksimal Maret 2025, 4) Kinerja Januari 2025 perlu diapresiasi karena telah ada peningkatan kredit walaupun belum sesuai target RBB, Peran PE perlu ditingkatkan untuk memantau kinerja masing-masing tim mengingat di tahun 2025 Bank masih menghadapi persoalan pokok yang sama dengan tahun 2024. Diharapkan Direksi dan jajarannya dapat melaksanakan strategi yang telah ditetapkan dan konsen pada masalah kredit baik secara kualitas maupun kuantitas.</p>

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
2	27/05/2025	2	<p>Materi rapat Dekom tanggal 27 Mei 2025 antara lain : 1) Evaluasi kinerja BPR 30 April 2024 dan pencapaian target terhadap Rencana Bisnis yang telah ditetapkan belum seluruhnya tercapai 100%, Aset 96,46%, Kredit 105,35%, DPK 98,97%, Tabungan 94,32%, deposito 94,35%, laba -172%; 2) Pencapaian kredit sudah melebihi target namun tidak diimbangi dengan pencapaian laba ; 3) Pertumbuhan yoy sebagai berikut : Aset 3,24%, Kredit 6,85%, DPK -0,88%, Tabungan -1,59%, deposito -0,69%, pendapatana 38,75%, biaya 64,47%,laba -150%; 4) TKS dalam kategori sehat; 4) Operasional Bank Sehat. Rekomendasi untuk Direksi antara lain : a. Direksi perlu mengevaluasi Rencana Kerja Bank karena ada kesenjangan yang cukup tinggi pada pos pendapatan dan biaya, b. Pencapaian NPL yang masih tinggi menunjukkan penurunan kualitas kredit, terkait dengan debitur yang kesulitan membayar kewajiban perlu dikaji apakah kondisi pasar pada bidang usahanya yang menurun atau analisa kredit kita yang kurang tepat dalam menilai kapasitas debitur. Hal ini perlu dievaluasi apakah pemasaran kredit sudah pada pasar yang tepat atau diperlukan pelatihan mendapat untuk memperkuat analisa kreidt c. Manajemen diharap membuat kebijakan internal mengenai kenaikan plafon, contohnya Top Up Kredit. Dalam kebijakan internal dapat ditentukan batas maksimal baik dalam jangka waktu atau plafin agar risiko dapat diminalisir, AO diharapkan tidak hanya fokus pada Top Up pinjaman agar NOA kredit juga bertumbuh.</p>

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
3	22/08/2025	2	<p>Materi rapat Dewan komisaris pada tanggal 22 Agustus 2025 antara lain : 1) Evaluasi kinerja BPR Mei, Juni, Juli 2025, kinerja BPR pada bulan Juli 2025 : Aset 100,28%, Kredit 105,79%, DPK 98,87%, Tabungan 103,14%, dan Deposito 97,77%, pada pos aset; 2) kredit dan laba mengalami peningkatan dan terealisasi diatas RBB sedangkan DPK masih dibawah RBB tetapi masih dalam batas toleransi, KAP dan NPL cenderung menurun kualitasnya, pos pendapatan dan biaya mengapami peningkatan pencapaian melebihi RBB ; 3) Tingkat pertumbuhan yoy : Aset 5,28%, Kredit 14,23%, DPK 5,04%, Tabungan 0,73%, Deposito 6,28%, pendapatan 5,6%, biaya 11,56%, laba -58,61%, pertumbuhan biaya melebihi pertumbuhan pendapatan; 4) Kesehatan Bank dalam kategori Sehat dengan rasio CR 14,28%, LDR 101,91%, KPMM 33,06%, MIAPAB 1218,95%, NPL Net 12,62%, KAP 9,47%, ROA 0,52%, BOPO 96,32%, rasio yang belum optimal adalah NPL, BOPO, ROA, dan KAP; 4) Rekomendasi untuk Direksi antara lain : a. Direksi dan jajarannya perlu meningkatkan kinerja lebih serius karena tantangan yang cukup berat di tahun 2025, Fokus dalam penyelesaian NPL (Kredit bermasalah) sehingga tidak perlu membentuk CPKN karena akan berpengaruh pada pencapaian laba, b. Mengapresiasi program Direksi yang memprioritaskan aspek kredit sehingga dapat melebihi RBB, Remedial fokus dalam penyelesaian kredit bermasalah, namun perlu dievaluasi untuk menentukan langkah penyempurnaan dengan tetap berpegang pada prinsip prudential banking, c. Pada kredit sindikasi, profil sindikasi perlu dimasukkan dalam bagian analisa kredit, membuat kesepakatan diantara sindikan sehingga kredit sindikasi aman karena permasalahan kredit sindikasi akan lebih rumit karena perlu kesepakatan seluruh sindikan dalam penyelesaian kredit bermasalah, d. Perlu dipertimbangkan untuk membuat produk pinjaman khusus untuk karyawan sehingga dapat mendukung pertumbuhan kredit Bank, e. Konsen pada peningkatan NOA melalui pencairan kredit yang lebih retail.</p>

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
4	12/11/2025	2	<p>Materi rapat Dewan Komisaris pada tanggal 12 November 2025 antara lain : 1) Kinerja BPR pada 31 Oktober 2025, Aset 103,03%, Kredit 103,19%, Simpanan 99,81%, Tabungan 98,84%, Deposito 100,06%, Pos yang telah tercapai adalah Aset, Kredit, dan deposito; 2) KAP &amp; NPL cenderung menurun sedangkan pos pendapatan dan biaya meningkat diatas target; 3) Pertumbuhan yoy posisi 31 Oktober 2025 tumbuh positif kecuali pada pos tabungan dan laba, Aset 4,61%, Kredit 4,86%, DPK 2,98%, Tabungan -5,87%, Deposito 5,47%, pendapatan 8,4%, biaya 9,81%, laba -1,77%; 4) Tingkat kesehatan dalam kategori SEHAT dengan rasio CR 16,49%, LDR 99,57%, KPMM 33,91%, MIAPB 159,34%, NPL Net 11,2%, KAP 7,45%, ROA 1,71%, BOPO 88,71%; 5) Rekomendasi untuk Direksi : a. Direksi dan jajarannya perlu meningkatkan kinerja Bank sehingga RBB dapat terealisasi secara maksimal, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah recovery hasil kinerja masih kurang bagus karena target baru tercapai pada semester II ; b. Rasio LDR kurang bagus karena untuk efisiensi biaya Direksi cenderung menekan DPK hal ini kurang tepat di diterapkan karena akan berpengaruh pada reputasi Bank; c. Pemberian kredit top up ketentuannya belum dimasukan dalam PKPB serta kajian MR belum dibuat, dalam pemberian top up perlu diperhatikan kapasitas debitur dan prospek usaha; d. Pelaksanaan fungsi kepatuhan khususnya pelaksanaan APU PPT sudah cukup baik namun wilayah cabang Seturan perlu ditingkatkan pengkinian datanya karena belum memenuhi target.</p>

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
5	27/02/2025	4	<p>Materi rapat Pengurus pada tanggal 27 Februari 2025 antara lain : Direksi menyampaikan kinerja BPR untuk periode 30 November 2024 sampai dengan 31 Januari 2025; Tanggapan Komisaris sbb : a. Yang menjadi tantangan dan perhatian adalah NPL yang cukup tinggi sehingga tugas remedial makin bertambah, bagaimana manajemen menghadapi hal tersebut?; b. Konsistensi pertumbuhan pada 4 komponen utama Bank yaitu Aset, Kredit, DPK, dan; c. Hasil kinerja Bank dengan rata2 industri di dibawah rata2 industri (posisi November 2024); d. Perkembangan pencapaian Kredit harus menjadi konsen manajemen mulai awal tahun, Peran PE bisnis terus ditingkatkan untuk mendorong pencapaian kinerja AO dan Kasi marketing dengan menetapkan strategi, langkah2 pencapaian dan pemantauan perkembangannya; e. Untuk pertumbuhan DPK perlu diperhatikan; Tanggapan Direksi : a. NPL pada posisi Desember 2024 telah ada perbaikan dengan penyelesaian kredit melalui penjualan jaminan melalui lelang KPKNL, namun masih ada kendala terkait perubahan nama Bank sesuai UU P2SK sehingga harus menyesuaikan nomenklatur; b Kinerja BPR masih dibawah rata2 industri akan menjadi perhatian kami; c. Fokus penyaluran kredit saat ini pada plafon sd Rp 300 juta sehingga pertumbuhan kredit agak lambat tetapi mendorong pertumbuhan NOA, untuk pemantauan AO Pemasaran dilakukan melalui google drive, Direksi melakukan pemantauan setiap minggu, PE Bisnis yang belum mencapai target akan dilihat apa permasalahannya; d. Untuk rencana DRC ada 2 pilihan dengan biaya Rp 6juta/bulan atau membeli PC baru, untuk pengiriman notifikasi yang diubah dari wa ke email ada banyak complain dari; e. Pengkinian data telah dilakukan sesuai dengan rencana yang dilaporkan kepada OJK, Pemeriksaan DTTOT telah dilakukan dan dilaporkan kepada OJK dengan hasil NIHIL, Tidak ada transaksi keuangan yang mencurigakan dan transaksi tunai yang diaporkan kepada PPATK, penilaian profil nasabah telah dilakukan sesuai ketentuan.</p>

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
6	30/05/2025	4	<p>Materi rapat Pengurus BPR pada tanggal 30 Mei 2025 antara lain Penyampaian hasil kinerja Maret sd April 2025; Tanggapan Dewan Komisaris adalah sbb: a. Mengapresiasi manajemen atas hasil kinerja, kredit mencapai target, DPK tetap perlu diperhatikan pertumbuhannya karena akan berpengaruh terhadap pencapaian Aset, untuk likuiditas perlu dilakukan pemantauan DPK yang jatuh tempo sehingga apabila ada penarikan dapat segera dicari gantinya; b. Kualitas kredit trennya menurun selama 3 tahun, perlu dievaluasi RBB agar lebih riil, demikian juga pendapatan dan biaya karena kesenjangan yang cukup tinggi; c. Efisiensi biaya SDM dapat dilakukan dengan peningkatan kinerja SDM melalui peningkatan kapasitas SDM, jangan sampai beban kerja menurunkan kinerjanya, perlu dipikirkan marketing digital; d. Kesulitan bayar debitur dikaji apakah pasarnya yang kurang tepat atau analisa kredit yang kurang baik. Tanggapan Direksi adalah sbb : a. Pengelolaan aset khususnya DPK akan diperhatikan; b. Penyelesaian kredit bermasalah di KPKNL masih terkendala nomenklatur, diusahakan penyelesaian kredit melalui pengadilan; c. RBB akan dilakukan koreksi dan akan segera dilaporkan; d. Terkait kesulitan bayar debitur yang tidak dapat dikendalikan adalah munculnya kredit baru di lembaga lain setelah pencairan yang menyebabkan pembayaran terganggu; e. Pengkinian data telah dilakukan sesuai dengan rencana yang dilaporkan kepada OJK, Pemeriksaan DTTOT telah dilakukan dan dilaporkan kepada OJK dengan hasil NIHIL, Tidak ada transaksi keuangan yang mencurigakan dan transaksi tunai yang dilaporkan kepada PPATK, penilaian profil nasabah telah dilakukan sesuai ketentuan; f. Untuk perpanjangan sewa kantor pusat telah dilakukan appraisal sehingga harga sewa tidak melebihi appraisal tidak melebihi target yang telah ditetapkan.</p>

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
7	23/08/2025	4	<p>Materi rapat Pengurus BPR pada tanggal 23 Agustus 2025 Penyampaian hasil kinerja Mei sd Juli 2025; Tanggapan Dewan Komisaris adalah sbb: a. Restrukturisasi kredit yang dilakukan secara plafondering akan berisiko kredit macet kembali setelah 3 bulan kredit dinyatakan Lancar; b. NPL masih cukup tinggi sehingga perlu ditingkatkan kualitas analisa kredit agar peningkatan outstanding kredit tidak turut meningkatkan NPL; c. kredit sindikasi perlu diperhatikan adanya klausa kesepakatan bersama dan profil sindikan juga dapat dituangkan dalam analisa kredit; d. Kebijakan Top up untuk disesuaikan lagi karena dapat dilakukan minimal kredit berjalan 6 bulan kurang tepat diterapkan untuk kredit dengan jangka panjang, lebih tepat dalam bentuk prosentase. Tanggapan Direksi adalah sbb: a. Restrukturisasi telah dilakukan analisa atas kapasitas debitur, namun demikian masih ada yang macet kembali karena kondisi debitur yang belum dapat pulih sehingga kembali tidak dapat membayar setelah dilakukan restrukturisasi. b. NPL masih tinggi, untuk peningkatan kualitas kredit akan diadakan pelatihan analisa kredit secara internal; c. Kredit sindikasi saat ini komposisinya 22% dari total kredit, untuk mendorong peningkatan kredit akan diberikan kelonggaran 35; d. Kebijakan Top ditetapkan 50% untuk kredit dengan jangka waktu &lt; 18 bulan untuk kredit dengan jangka waktu &gt; 18 bulan ditetapkan 25%; e. Produk pinjaman karyawan belum ada program, akan kami tindak lanjuti; d. Pengadaan DRC belum dapat dilakukan karena masih ada biaya yang cukup tinggi, tetapi akan kami perhatikan keamanan data dan back up data, notifikasi kembali menggunakan wa; e. Pengkinian data telah dilakukan sesuai dengan rencana yang dilaporkan kepada OJK, Pemeriksaan DTTOT telah dilakukan dan dilaporkan kepada OJK dengan hasil NIHIL, Tidak ada transaksi keuangan yang mencurigakan dan transaksi tunai yang diaporkan kepada PPATK, penilaian profil nasabah telah dilakukan sesuai ketentuan.</p>

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
8	12/11/2025	4	<p>Materi rapat Pengurus BPR pada tanggal 13 November 2025 Penyampaian hasil kinerja Agustus - Okt 2025; Tanggapan Dewan Komisaris adalah sbb: a. Masih banyak RBB yang belum tercapai sehingga rekayasa RBB masih kurang bagus, Direksi harus memberikan batas yang jelas untuk recovery dan bagaimana dapat tercapai; b. DPK belum mencapai target yang berpengaruh pada LDR; c. Top up belum dimasukan di PKPB dan belum ada kajian MR, perlu diperhatikan prospek usaha dalam analisa kredit; d. Penambahan modal perseroan dapat dilakukan melalui penambahan saham prioritas atau saham seri B; e. Perlu diperhatikan kedisiplinan SPI dalam mengirimkan laporan kepada Dekom; ketercapaian pengkinian data cenderung menurun; f. Dalam menyusun RBB 2026 perlu diperhatikan Kredit dapat tecapai sejak awal tahun, NPL lebih riil, target LDR sesuai antara rencana DPK dan Kredit, SE tidak hanya fokus pada perdagangan tetapi dikembangkan pada sektor lain, kebangkan juga sektor konsumsi, Pengadaan DRC dan genset harus terlaksana mengingat server harus bekerja 24 jam agar layanan VA dapat berjalan. Tanggapan Direksi adalah sbb: a. Recovery hasil kinerja akan diperhatikan, biaya naik karena pembentukan CPKN, namun apabila ada perbaikan kualitas kredit atau penyelesaian kredit maka ada pemulihan CKPN yang mendukung laba; b. Penvapaian LDR akan diperhatikan; c. PKPB akan disesuaikan khususnya ketentuan kredit TOP UP dan kajian MR akan dilengkapi; d. Kedisiplinan laporan SPI akan ditindaklanjuti; e. Penyusunan RBB akan kami tinda lanjut; d. . Pengkinian data akan diperhatikan, Pemeriksaan DTTOT telah dilakukan dan dilaporkan kepada OJK dengan hasil NIHIL, Tidak ada transaksi keuangan yang mencurigakan dan transaksi tunai yang diaporkan kepada PPATK, penilaian profil nasabah telah dilakukan sesuai ketentuan.</p>

Keterangan :

Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Pengurus BPR diselenggarakan minimal setiap Triwulan sebagai pemantauan atas kinerja BPR namun Direksi menyampaikan laporan kinerja BPR setiap bulan kepada Dewan Komisaris. Rapat dapat diselenggarakan secara fisik ataupun daring (telekonfrensi).

### J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	ST. Sudomo, DRS.MM	8	0	53,33
2	Sapto Dewo, SE.Msi	8	0	53,33

**Keterangan :**

Selama Tahun 2025 Rapat Dewan Komisaris diadakan dalam 4 kali dan Rapat Pengurus diadakan dalam 4 kali dihadiri dengan seluruh Anggota Dewan Komisaris. Seluruh rapat diselenggarakan secara fisik.

**K. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)**

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

**Keterangan :**

Selama Tahun 2025 tidak terjadi internal fraud yang dilakukan oleh Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pegawai Tetap, maupun Pegawai Tidak Tetap

#### L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	1
Dalam Proses Penyelesaian	0	1
Total	1	2

Perkara yang telah selesai adalah sebagai berikut Perkara Perdata an Rohmatun Nisa debitur melakukan gugatan Di PN Bantul atas jaminan yang dilakukan pelelangan oleh Bank,dan gugatan tersebut ditolak karena gugatannya seharusnya diajukan ke PN Yogyakarta. Perkara Pidana an Rinawati Debitur dilaporkan oleh Bank atas penggelapan barang jaminan yang menjadi jaminan di Bank berupa Mobil Suzuki Baleno tahun 1997. Dan dari perkembangan penyelidikan di Polres Sleman barang tersebut memang telah digadaikan kepada pihak ke 3.Atas hal tersebut pihak kepolisian menaikan status menjadi penyidkan dan dilimpahkan kekejaksaan Negeri Sleman yang kemudian setelah berkas P21 dilakukan penahanan terhadap debitur.Kemudian dari pihak keluarga melakukan pelunasan ke Bank dan sepakat untuk melakukan perdamaian atau restorative justice. Perkara yang masih dalam proses an Aris Budiyono, Debitur sudah dilaporkan di Polres Bantul dan sudah dilakukan BAP maupun pemanggilan terhadap debitur maupun yang menguasai jaminan namun untuk debitur saat ini sedang diluar kota dan menguasai jaminan tidak mau meyerahkan jaminan saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh Polres Bantul

**M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Dwi Hari Laksana, SE.MH	Direkrur Utama	Wahyu Susila Listya Ari, SE.MH	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan	Tunai	579	Sewa Gedung Kantor Pusat BPR Profidana sesuai penjanjian sewa Notariil No 89 tanggal 30 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Notaris Honggo Sigit Nurcahyo,SH dengan jangka waktu sewa selama 3 tahun mulai 01 Juni 2025 - 31 Mei 2028. Bank meminta Appraisal independen untuk menilai kewajaran harga sewa yang ditawarkan. Berdasarkan Laporan Penilaian Sewa Properti SHM No. 11499 Kantor Jasa Penilaian Publik SIH WIRYADI & REKAN No LAP : 00155/2.0013-01/PI/07/0417/1/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 Harga sewa gedung dipastikan dibawah harga yang ditetapkan oleh appraisal independen

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
2	Dwi Hari Laksana, SE.MM	Direkrur Utama	Wahyu Susila Listya Ari, SE.MH	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan	Tunai	131	Sewa Kantor Cabang Bantul beralih kepada Ibu Edi Soelistijani SH karena ada Jual beli antara Bapak Gerardus Subari (Pemilik Lama) dengan Ibu Edi Soelisjitani berdasarkan Sertifikat SHM No 0982 tanggal 15 November 2018, berdasarkan surat perjanjian sewa Notariil No 01 Tanggal 6 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Visia Wahyuni Pujiastuti, SH antara Bapak Gerardus Subari dengan Dwi Hari Laksana SE.MM dengan jangka waktu sewa kantor Cabang Bantul BPR Profidana dari 31 Juli 2018 sampai dengan 30 Juli 2027 atau 9 tahun dengan harga sewa 4 tahun, Ibu Edi Soelistijani SH hanya meneruskan sampai jangka waktu sewa selesai berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ibu Edi Soelistijanji SH dengan Bapak Gerardus Subari dihadapan Notaris Ibu Visia Wahyuni Pujiastuti,SH pada tanggal 24 September 2018

BPR menyewa 2 kantor yang dimiliki oleh pemegang saham, atas sewa telah dilakukan penilaian oleh Appraisal independen terhadap gedung yang disewakan sebagai Kantor Pusat BPR Profidana untuk menentukan harga sewa dan melihat kewajaran harga sewa yang ditawarkan oleh pemilik sehingga harga sewa tidak melebihi harga pasarnya agar tidak menimbulkan kerugian bagi BPR. Untuk Sewa Kantor Cabang Bantul tidak dilakukan penilaian oleh Appraisal Independen karena perjanjian sewa telah berjalan sebelumnya dengan pemilik lama sehingga peralihan pemilik tidak menimbulkan harga sewa kembali. Sesuai dengan ketentuan Benturan Kepentingan Maka pengambilan keputusan sewa dilakukan oleh direktur karena Direktur Utama memiliki hubungan keluarga dengan pemegang

**N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain**

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	10/03/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan siswa berprestasi	YKPN	1.000.000
2	25/03/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bakti Sosial	Kampung Jowahan Sumberagung Moyudan Sleman	7.194.100
3	27/3/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Zakat Fitrah untuk karyawan	Mesjid Mergosono	2.194.500
4	23/4/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan siswa berprestasi	Politeknik YKPN	1.500.000
5	03/6/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Kegiatan Masyarakat	Bantul	500.000
6	11/06/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Qurban	Srandakan	3.700.000
7	08/07/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Kegiatan Masyarakat	Dongkelan	500.000
8	11/08/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Kegiatan Masyarakat	Dongkelan	1.000.000
9	13/08/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Kegiatan Masyarakat	Pasar Beringharjo Timur	250.000
10	13/08/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Kegiatan Masyarakat	Pasar Beringharjo Tengah	250.000
11	29/08/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Kegiatan pelestarian lingkungan penanaman mangrove	Pantai Samas Bantul	7.247.500
12	22/09/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Kegiatan Masyarakat	Porkal Donotirto	300.000
13	16/10/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Kegiatan Masyarakat	Panggungharjo	5.000.000
14	18/11/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Kegiatan Masyarakat	Panggungharjo	200.000
15	0/12/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan sosial bencana alam Aceh dan Sumatera	Yayasan Alquran Indonesia	1.000.000
16	08/12/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Kegiatan bakti sosial HKSNI 2025	Dinas Sosial DIY	1.000.000
17	18/12/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan sosial bencana alam Aceh dan Sumatera	Yayasan Alquran Indonesia	2.000.000

Keterangan :

CSR BPR Profidana digunakan untuk mendukung kegiatan kemasyarakatan, keagamaan, sosial, dan siswa berprestasi